



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018



Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : dr. Dodo Suhendar, MM
Jabatan : Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : dr. Untung Suseno Sutarjo, M.Kes
Jabatan : Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama akan mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

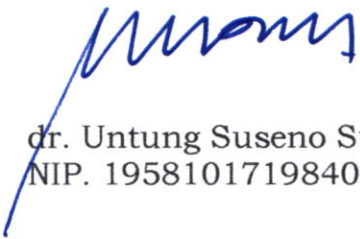
Pihak kedua akan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini sebagai pertimbangan penyusunan anggaran tahun berikutnya.


Pihak pertama dan kedua akan membahas ulang perjanjian ini bila terjadi perubahan kebijakan anggaran.

Jakarta, Januari 2018

Pihak kedua,

Pihak Pertama,


dr. Untung Suseno Sutarjo, M.Kes
NIP. 195810171984031004


dr. H. Dodo Suhendar, MM
NIP.196509281990101001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA BARAT**

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS LAINNYA	Persentase harmonisasi dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya	
1.	Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Barang Milik Negara	Layanan Manajemen Keuangan Bidang Kesehatan	1 Layanan
2.	Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan	1. Layanan Perencanaan Bidang Kesehatan 2. Layanan Pemantauan dan Evaluasi Bidang Kesehatan	1. 1 Layanan 2. 1 Layanan
3.	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Layanan Data dan Informasi	1 Layanan
4.	Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji	Pelayanan Kesehatan Haji	38.852 Jemaah Haji
2.	PROGRAM PENGUATAN PELAKSANAAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN)/KARTU INDONESIA SEHAT (KIS)	Jumlah penduduk yang menjadi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN/KIS)	
1.	Pengembangan Pembiayaan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN/Kartu Indonesia Sehat (KIS)	Bahan Kebijakan Teknis Pengembangan Pembiayaan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN/Kartu Indonesia Sehat (KIS)	1 Dokumen